

## EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH DI KABUPATEN KARO

Ahmad Rofii Nasution<sup>1(a)</sup>, Sally Marisa Sihombing<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara

<sup>a)</sup>ahmadrofie8@gmail.com, <sup>b)</sup>sallymarisa@usu.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

03-07-2023

Diterbitkan Online:

01-06-2024

#### Kata Kunci:

Evaluasi, Program, Kota  
Tanpa Kumuh, Kawasan  
Kumuh

#### Keywords:

Evaluation, Program, Cities  
Without Slums, Slums Area

#### Corresponding Author:

ahmadrofie8@gmail.com

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i2.772>

### ABSTRAK

Program Kota Tanpa Kumuh atau KOTAKU merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan kota yang layak huni bagi masyarakat Indonesia, salah satunya di Kabupaten Karo. Namun dalam realisasinya masih terdapat permasalahan sampah di Kabupaten Karo dan drainase yang buruk yang menandakan bahwa KOTAKU belum terealisasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji realisasi evaluasi program KOTAKU dalam menangani kawasan kumuh di Kabupaten Karo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KOTAKU di Kabupaten Karo telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga memenuhi indikator efektivitas. Program KOTAKU telah memenuhi indikator kecukupan di mana KOTAKU menjadi solusi atas permasalahan kumuh di Kabupaten Karo, memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat, dan membantu masyarakat untuk mengubah kebiasaan menjadi lebih ramah lingkungan. Sayangnya, fokus program KOTAKU berada di daerah Kabanjahe dan Berastagi.

### ABSTRACT

*The City Without Slums Program or KOTAKU is a government program that aims to overcome poverty and create livable cities for Indonesian people, one of which is in Karo Regency. However, in reality there are still waste problems in Karo Regency and poor drainage which indicates that KOTAKU has not been realized properly. This study aims to describe and examine the evaluation realization of the KOTAKU program in dealing with slum areas in Karo District. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The results of the research show that the implementation of KOTAKU in Karo Regency is in accordance with the predetermined plan so that it meets the indicators of effectiveness. The KOTAKU program has met the adequacy indicators where KOTAKU is a solution to the slum problem in Karo Regency, provides better access to the community, and helps the community to change habits to become more environmentally friendly. Unfortunately, the focus of the KOTAKU program is in the Kabanjahe and Berastagi areas.*

## PENDAHULUAN

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia dimana banyak sekali faktor yang menjadikan kawasan tersebut menjadi kumuh seperti bertambahnya jumlah penduduk dimana terjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dari segi tempat tinggal ataupun perumahan dikarenakan kurangnya ketersediaan lahan sehingga menimbulkan keterbatasan dalam pembangunan perumahan untuk tempat tinggal yang lebih layak. Urbanisasi yang semakin meningkat menjadi permasalahan dalam penyediaan lahan dalam penyediaan sarana permukiman terkhusus di kawasan perkotaan yang menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan dan menciptakan permukiman kumuh.

Permukiman kumuh bukan hanya sekedar memberikan dampak visual buruk saja, akan tetapi memberikan dampak yang tidak baik terutama dalam perkembangan fisik kota secara menyeluruh dan hanya membantu masyarakat sekedar bertempat tinggal saja tanpa memberikan kontribusi secara positif dari segi sosial dan juga ekonomi (Diakses dari [kotaku.pu.go.id](http://kotaku.pu.go.id)). Permukiman kumuh di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir meningkat hingga lebih dari dua kali lipat seiring meningkatnya juga jumlah penduduk perkotaan terutama di pulau Jawa dan diikuti wilayah perkotaan lainnya (Dikutip dari [Ekonomi.bisnis.com](http://Ekonomi.bisnis.com), 2022). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak, hal tersebut dikarenakan hak dasar yang harus dijamin sepenuhnya oleh pemerintah.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan “100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program KOTAKU dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah

provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama serta bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujud permukiman perkotaan layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten dalam melaksanakan program KOTAKU yang sudah berhasil dalam melakukan pembaharuan dalam menangani kawasan kumuh seperti salah satu Kecamatan yang sudah menjadi sasaran dari program KOTAKU adalah Kabanjahe dimana sudah banyak perubahan dari yang sebelumnya lingkungan kumuh menjadi lebih baik lagi dimana dalam hal ini berfokus kepada pembaharuan jalan dan juga perbaikan sanitasi bahkan pada tahun 2020 untuk kawasan Kabanjahe sendiri mampu mengurangi seluas 19,40 Ha yang tentunya memberikan dampak signifikan bagi kawasan tersebut dan juga mendapat respon baik dari masyarakat.

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Karo juga banyak mendapatkan respon baik itu dari masyarakat terutama para stakeholder yaitu dari Pemerintahan Kabupaten Karo dan juga mereka memiliki komitmen yang kuat dalam mengatasi permukiman kumuh di Kabupaten Karo sebagai salah satu bentuk dari untuk menciptakan permukiman yang layak huni. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Karo melalui program KOTAKU berfokus untuk membenahi drainase yang ada dimana masih sering terjadi banjir di setiap sudut kota Berastagi dan Kabanjahe dikarenakan kondisi drainase yang tidak memenuhi standart yang ada. Selain memfokuskan kepada drainase Pemerintah Kabupaten Karo sendiri juga memiliki target dalam menurunkan angka permukiman kumuh sehingga sampai pada tahun 2018 berhasil menurunkan angka kawasan kumuh seluas 111,59 Ha merupakan angka yang cukup besar (Dikutip dari [Orbitdailiy.com](http://Orbitdailiy.com)).

Penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Karo yang dapat dikatakan tergolong baik, namun masih banyak permasalahan yang tak kunjung terselesaikan bahkan sebaran luasan permukiman kumuh yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya memberikan adanya penurunan dalam program Kota Tanpa Kumuh

(KOTAKU) yang sudah berjalan. Berdasarkan Keputusan Bupati Karo No. 653/029/Perkim/2021 terkait penetapan luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Karo dapat dilihat melalui Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Luas Permukiman dan Perumahan Kumuh di Kabupaten Karo**

No	Kelurahan	Luas Kumuh	Tipologi Permukiman
1.	Tambak Lau Mulgap	3,00 Ha	Perkotaan
2.	Sumber Mufakat	3,00 Ha	Perkebunan
3.	Sempajaya	15,60 Ha	Perkebunan
4.	Samura	6,00 Ha	Perkebunan
5.	Rumah Berastagi	22,00 Ha	Perkebunan
6.	Raya	52,00 Ha	Perkebunan
7.	Padang Mas	24,77 Ha	Perkotaan
8.	Lau Gumba	19,00 Ha	Perkebunan
9.	Lau Cimba	27,40 Ha	Perkotaan
10.	Kandibata	12,50 Ha	Perkebunan
11.	Kampung Dalam	23,67 Ha	Perkotaan
12.	Kaban	5,60 Ha	Perkebunan
13.	Gung Negeri	53,20 Ha	Perkebunan
14.	Gundaling II	11,69 Ha	Perkebunan

Sumber: *Konsultan Program KOTAKU Kabupaten Karo, 2022*

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa kawasan permukiman dan perumahan kumuh terletak pada Kelurahan Raya dengan luas 52,00 Ha dan Kelurahan Tambak Lau Mulgap dan Sumber Mufakat dengan luas 3,00 Ha. Peningkatan kawasan kumuh berdasarkan konsultan yang dikeluarkan dengan pembagian wilayah dan luasan yang menunjukkan bahwasanya masih banyak kekurangan Pemerintah Kabupaten Karo dalam mengatasi permukiman dan perumahan kumuh yang semakin berkembang. Sepatutnya Pemerintah Kabupaten Karo beserta tim penanganan kawasan kumuh lainnya untuk berbenah dan menjadikan program tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan, Pemerintah Kab/ Kota sebagai nahkoda dalam menjalankan program ini tentunya berperan penting dalam melakukan penanganan kawasan kumuh yang berada di Kabupaten Karo.

Program Kota Tanpa Kumuh yang sudah berjalan di Kabupaten Karo belum sepenuhnya berjalan maksimal dikarenakan masih banyaknya indikator yang belum terpenuhi dan bahkan mulai mengalami penurunan jika dilihat

berdasarkan indikator program tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap program KOTAKU yang sudah dilakukan oleh para Pemerintah. Penelitian yang digunakan untuk melihat evaluasi ini, dimana peneliti menggunakan teori dari William M. Dunn (2003 : 608), yang menyatakan bahwa evaluasi adalah usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat yang bisa diukur dengan beberapa indikator seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan juga ketepatan. Efektivitas merupakan indikator yang melihat bagaimana program kotaku dalam mengatasi permasalahan yang ada di Kabupaten Karo dan melihat hasil yang bisa dikaji dari program kotaku dengan indikator ini bisa menilai keberhasilan yang ada dari program kotaku. Peningkatan yang terjadi dalam kawasan kumuh di Kabupaten Karo memberikan gambaran bahwasanya program KOTAKU belum mampu menangani perumahan dan permukiman kumuh yang bahkan seharusnya meminimalisir kawasan kumuh tersebut. Berdasarkan SK Bupati No. 653/029/Perkim/2021 terjadi peningkatan luas kawasan kumuh yang ditinjau dari beberapa kawasan seperti Mela Melket, Permukiman Asri, Permukiman Tradisional & Wisata, dan Kota Agrowisata yang memiliki angka kawasan kumuh tertinggi di Kabupaten Karo. Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwasanya permasalahan yang ada di Kabupaten Karo yakni kepadatan dan juga ketidakberaturan bangunan yang menimbulkan keterbatasan dalam lahan pada akhirnya menciptakan kekumuhan di Kabupaten Karo.

Peneliti berupaya untuk memastikan tercapainya tujuan serta sasaran penanganan kawasan permukiman kumuh perlu dilakukan adanya evaluasi yang efektif dan juga efisien. Perlunya evaluasi dalam program KOTAKU yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permukiman kumuh di Kabupaten Karo agar dapat diketahui sejauh mana keberhasilan program KOTAKU dalam rangka mengurangi permukiman kumuh di Kabupaten Karo. Sehingga pelaksanaan program KOTAKU di tahap selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan data dan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan program KOTAKU, hambatan dalam pelaksanaan program KOTAKU dan

upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karo dalam mengatasi permasalahan tersebut kemudian juga ditinjau dari beberapa Indikator evaluasi seperti Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Ibrahim (2018:55) pendekatan kualitatif merupakan cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) merupakan suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif maka peneliti mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan evaluasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Karo menggunakan 6 indikator utama dalam evaluasi program yang dikemukakan Dunn (2003) meliputi efektivitas, efisiensi, ketepatan, responsivitas, pemerataan dan kecukupan. Alasan untuk menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh dengan makna sehingga tidak mungkin dapat pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan, pedoman wawancara, menemukan pola, hipotesis, dan teori. Peneliti berusaha mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi dengan terjun langsung ke lapangan menemui informan. Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini dilakukan di 2 (dua) lokasi penelitian yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karo yang terdiri dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim). Dengan Informan Penelitian Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Konsultan Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Karo, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Permukiman, Perumahan, Pertanahan dan Perhubungan, Kepala Bidang

Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, pada penentuan informan peneliti menggunakan *purposive sampling* dengan begitu peneliti memilih dan menetapkan informan yang benar-benar mengetahui program Tanpa Kumuh di Kabupaten Karo. Selain itu, adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terakhir, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode sebagai teknik keabsahan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari tindakan (Dunn, 2003:429). Untuk mengetahui efektivitas Program KOTAKU di Kabupaten Karo dapat diketahui melalui pencapaian target program dan pelaksanaan program.

#### a) Pencapaian Target Program

Sebelum suatu program dilaksanakan, hal utama yang harus dilakukan adalah menentukan target yang hendak dicapai sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa pencapaian target program KOTAKU belum sepenuhnya tercapai. Adapun persentase ketercapaian program mencapai 90% dari target yang sudah ditentukan yaitu adanya perubahan dari jalan, perbaikan drainase, sanitasi dan lingkungan yang semakin tidak kumuh sehingga program KOTAKU dapat dinikmati oleh masyarakat walaupun belum mencapai 100%. Ketercapaian target ini sesuai dengan tujuan Program KOTAKU pada SK Bupati Kabupaten Karo tentang Program KOTAKU yang menyatakan bahwa tujuan dari KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Sebagaimana pendapat Agus Dharma (2001 : 32) bahwa target merupakan sasaran dari pernyataan spesifik mengenai suatu kegiatan atau hasil yang dapat diukur, dinilai, dan direncanakan cara pencapaiannya. Jadi, dapat disimpulkan program KOTAKU terlaksana

sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dengan ukuran setiap indikatornya sehingga ketika pelaksanaan program bisa lebih jelas dan terarah. Berdasarkan pernyataan pihak Bappeda Kabupaten Karo dapat diketahui bahwa telah tercapai pencapaian target Program KOTAKU dari tahun ke tahun. Sebagai contoh dapat dilihat dari Tahun 2018 hingga 2021 sehingga jika satu indikator KOTAKU sudah berhasil mencapai target atau mendekati target maka target di tahun berikutnya adalah indikator yang lain. Dengan kata lain, setelah satu indikator berhasil dicapai maka akan terus dilakukan evaluasi berkaitan dengan bagaimana untuk bisa mencapai target indikator.

Selain itu, untuk mengetahui pencapaian target pelaksanaan Program KOTAKU diperlukan peran konsultan KOTAKU, peran konsultan yang merupakan salah satu fasilitator bagi masyarakat di lapangan dalam pengerjaan program KOTAKU baik itu dari perencanaan hingga akhir dari pelaksanaan program KOTAKU berjalan. Konsultan inilah yang akan mendampingi pemerintah dan masyarakat untuk menggunakan anggaran dari pemerintah pusat untuk mencapai target program KOTAKU sehingga ketujuh indikator yaitu kondisi bangunan gedung, jalan, drainase, sanitasi, persampahan, air minum layak, dan ruang terbuka public dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan Informasi yang didapat diketahui bahwa target dari Program KOTAKU telah tercapai dan berjalan sebagaimana perencanaan yang telah ditentukan. Dapat dilihat berdasarkan table target baseline kekumuhan yang dibawah ini.

**Tabel 2. Tabel Baseline Kumuh di Kabupaten Karo**

No.	Kelurahan	Bangunan	Jalan	Drainase	Air Minum	Sanitasi	Sampah
1.	Tambak Lau Mulgap II	0 Unit	2.955 m	1.750 m	42 KK	39 KK	237 KK
2.	TambakLau Mulgap I	530 Unit	1.548 m	1.170 m	530 KK	530 KK	530 KK
3.	Sumber Mufakat	0 Unit	16.810 m	2.533 m	0 KK	0 KK	0 KK
4.	Sempajaya	0 Unit	7.064 m	7.381 m	0 KK	0 KK	1554 KK
5.	Rumah Berastagi	244 Unit	5.575 m	11.145 m	112 KK	100 KK	1509 KK
6.	Raya	224 Unit	9.676 m	3.268 m	44 KK	112 KK	592 KK
7.	Lau Gumba	0 Unit	1.180 m	635 m	0 KK	0 KK	30 KK
8.	Gurusinga	6 Unit	484 m	840 m	181 KK	4 KK	785 KK
9.	GundalingII	519 Unit	3.889 m	4.395 m	28 KK	118 KK	800 KK
10.	Gundaling I	19 Unit	5.850 m	3.786 m	22 KK	22 KK	0 KK

Berdasarkan tabel 2 adanya baseline kekumuhan per kelurahan yang ditentukan merupakan target kekumuhan yang dilihat dari beberapa indikator seperti bangunan, jalan, drainase, sanitasi, air minum dan sampah yang menjadi target dalam mengurangi angka kekumuhan yang ada di Kabupaten Karo.

Pencapaian target program dapat dicapai melalui kerja sama dengan konsultan sehingga dapat saling bertukar pikiran dengan pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pencapaian target KOTAKU tidak hanya berbicara tentang angka namun juga melihat perencanaan matang yang telah dilakukan dengan melibatkan pihak pemerintah kabupaten dan konsultan serta masyarakat.

Berdasarkan informasi yang didapat diketahui bahwa Program KOTAKU telah berhasil mencapai target untuk memperbaiki permasalahan indikator yang ada. Bahkan terdapat dua daerah yang menjadi percontohan Program KOTAKU yakni Kecamatan Berastagi dan Kecamatan Kabanjahe. Maka dari itu, program KOTAKU telah berhasil mencapai target yang ditetapkan yakni sebanyak 90% sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan Program KOTAKU untuk menyediakan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh telah mendapatkan apresiasi. Hal ini selaras dengan pendapat (Kumorotomo, 2005 : 362) perlunya suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi. Target yang ditentukan diawal berjalannya program merupakan tolak ukur yang dijadikan dalam berjalannya program KOTAKU yaitu dimana target tersebut sudah tercapai dengan angka yang tinggi dalam mengatasi kekumuhan. Untuk mengetahui pencapaian target dari 0% sampai 100%.

Pencapaian target program KOTAKU ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Nuraini dan Susilowati (2015) bahwa tercapainya target pada program KOTAKU ditandai dengan pencapaian goal atau tujuan dalam rentang 80 hingga 100% sehingga dapat dikatakan terukur pencaaiannya. Selain itu, partisipasi masyarakat dan pihak lainnya sangat mendukung pembangunan jalan paving blok dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya melalui pencapaian target tersebut. Berdasarkan beberapa hasil wawancara dapat kita lihat bahwasanya program KOTAKU yang berjalan tentunya mencapai hasil yang diharapkan oleh masyarakat dengan adanya ketercapaian target sesuai dengan perencanaan dan adanya partisipasi aktif dari pihak Pemerintah Kabupaten, Konsultan, Kelurahan dan juga masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kabupaten Karo.

b) Pelaksanaan Program

Berdasarkan informasi yang didapat diketahui bahwa pihak atau implementor dalam melaksanakan Program KOTAKU terdiri atas pihak Bappeda yang membuat perencanaan program. Lalu, Dinas Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Karo (PERKIMTAN) yang melaksanakan program di lapangan, kelompok masyarakat yang mengelola atau menjaga output dari Program KOTAKU hingga adanya Konsultan yang membantu pemerintah setempat dan masyarakat untuk mampu menggunakan anggaran dari pusat dengan efektif serta membantu sosialisasi program kepada masyarakat. Pelaksanaan Program KOTAKU sudah berjalan dengan baik. Dengan kata lain, dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat menjadi hal fundamental agar program KOTAKU mendapatkan hasil akhir yang maksimal hingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Keikutsertaan masyarakat berupa dana hingga tenaga serta pemikiran. Dana dan tenaga diperlukan untuk pemeliharaan output dari Program KOTAKU serta pemikiran untuk mendapatkan ide-ide perihal sejumlah cara untuk memelihara keberlangsungan Program KOTAKU di Kabupaten Karo. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam rentang tindak lanjut setelah adanya output dari Program KOTAKU. Kegiatan tindak lanjut yang dimaksud adalah pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan ini seperti gotong royong dalam membersihkan drainase. Namun, pemeliharaan yang dilakukan masyarakat tidak berjalan lancar seperti yang diekspektasikan karena tidak semua masyarakat memiliki persepsi yang sama untuk menjaga pemeliharaan program KOTAKU.

**Efisiensi**

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu (Dunn, 2003:430). Untuk efisiensi kebijakan tersebut dapat diukur dengan indikator seperti dari segi biaya, segi waktu dan juga segi tenaga. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses.

a) Waktu Pengerjaan

Berdasarkan informasi diketahui bahwa waktu pengerjaan bergantung kepada dana dan sumber daya lainnya yang diperlukan. Dana dan sumber daya lainnya sangat terbatas sehingga

pengerjaan Program KOTAKU memiliki waktu pengerjaan secara berkala dan perlahan. Dengan demikian, waktu pengerjaan tidak dapat dikerjakan dan diselesaikan sekaligus. Waktu pengerjaan Program KOTAKU secara tahap per tahap dilakukan agar Program KOTAKU dapat berjalan dengan lancar dengan ketersediaan dana dan sumber daya manusia. Selain itu, diketahui bahwa waktu pengerjaan yang dibutuhkan adalah 60 hari. Masyarakat juga tidak merasa berat jika waktu pengerjaannya lama dengan catatan bahwa lingkungan mendukung dan hasilnya tampak jelas. Hal terpenting adalah semua pihak yang terlibat saling bahu membahu dalam pengerjaan dan penyelesaian Program KOTAKU. Dengan demikian, waktu pengerjaan bergantung kepada bagaimana kerja sama dan dukungan semua pihak yang terlibat sehingga semua pihak dapat bertukar pikiran dan merealisasikan ide mereka.

b) Sumber Daya Finansial

Sumber pembiayaan program KOTAKU yang berasal dari Pemerintah pusat, Provinsi, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Anggaran negara harus dikelola secara efisien sehingga dengan sedikitnya anggaran yang dikeluarkan dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimum.

Telah dilakukan identifikasi tentang indikator kumuh di Kabupaten Karo beserta anggaran yang diperlukan untuk menangani permasalahan tersebut. Namun, jika semua kegiatan dilaksanakan dalam satu waktu atau sekaligus maka anggaran dan waktu tidak berjalan efisien sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat urgensi dari permasalahan tersebut. Indikator kumuh yang diutamakan dalam penanganannya adalah indikator dengan urgensi yang paling tinggi. Dengan demikian, dalam pelaksanaan Program KOTAKU berpedoman kepada tingkat urgensi permasalahan dan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah tabel anggaran yang direalisasikan untuk Program KOTAKU di Kabupaten Karo.

**Tabel 3. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Program KOTAKU Tahun 2022**

No.	Kelurahan	Dana KOTAKU
1	Doulu	Rp. 3.101.750.000
2	Gundaling I	Rp. 4.722.920.000
3	Gundaling II	Rp. 1.000.000.000
4	Gurusinga	Rp. 278.500.000
5	Lau Gumba	Rp. 1.785.950.000
6	Raya	Rp. 278.500.000
7	Rumah Berastagi	Rp. 278.500.000
8	Sempajaya	Rp. 8.114.500.000
9	Sumber Mufakat	Rp. 8.104.900.000
10	Tambak Lau Mulgap I	Rp. 278.500.000
11	Tambak Lau Mulgap II	Rp. 278.500.000

Sumber: Konsultan Program KOTAKU Kabupaten Karo, 2022

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa Kelurahan Sempajaya menjadi kelurahan dengan realisasi anggaran terbesar di Tahun 2022 dengan total Rp. 8.114.500.000. Realisasi anggaran ini diperlukan pendataan agar kedepannya dapat diketahui bagaimana pembangunan di Kelurahan Sempajaya. Dengan demikian, fokus pemerintah untuk tahun kedepannya tidak hanya kepada Kelurahan Sempajaya namun dapat kelurahan lainnya sehingga pembangunan atau pelaksanaan Program KOTAKU berjalan merata di setiap kelurahan. Pertimbangan menggunakan anggaran adalah tergantung kepada kondisi atau lingkungan yang ada. Jika lingkungan mendukung maka realisasi anggaran dapat dilaksanakan dengan lancar. Namun, jika sumber daya tidak mencukupi seperti lahan yang terbatas maka anggaran akan dialihkan kepada indikator dengan tingkat urgensi yang lainnya. dapat dijadikan sebagai suatu contoh tentang realisasi anggaran di Kelurahan Tombak Lao Mulgap I. Anggaran yang diperlukan adalah sebesar Rp. 7.920.000 dan swadaya atau masyarakat tidak mengeluarkan biaya. Selain itu, diberitahukan juga penerima manfaat dari perbaikan drainase sepanjang 100 meter ini. Pihak yang menerima manfaat adalah 65 KK. Dengan demikian, realisasi anggaran sudah memperhatikan keadaan di lapangan seperti kondisi lingkungan dan jumlah masyarakat yang mendapatkan dampak dari perbaikan drainase.

#### c) Sumber Daya Manusia

Ketersediaan SDM tergantung dengan bagaimana kondisi di lapangan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas SDM di lapangan. Namun, dikarenakan Program KOTAKU adalah program yang berasal dari pemerintah pusat maka SDM yang diberikan juga sangat

terbantu melalui kehadiran atau bantuan pusat yang salah satunya adalah Konsultan. diketahui bahwa SDM yang terlibat sudah sebanyak 70% terlibat. Khususnya dalam hal ini terdapat keterlibatan masyarakat yang dibentuk dalam suatu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Dengan demikian, KSM yang merupakan salah satu bentuk komunitas memiliki tujuan bersama-sama dan terdapat perasaan sepenanggungan untuk mensukseskan Program KOTAKU di Kabupaten Karo. Setiap BKM ini akan mempermudah pemerintah kabupaten untuk berkomunikasi dengan masyarakat sehingga BKM nantinya yang akan menjadi penghubung dengan masyarakat. Maka dari itu, BKM akan menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. Pentingnya peran masyarakat juga menjadi kajian yang harus diperhatikan dalam 3 (tiga) bidang yakni ekonomi, sosial, dan fisik. Peran masyarakat masih harus mengalami peningkatan khususnya dalam pemahaman tentang Program KOTAKU.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya, pelatihan juga dilakukan untuk menunjang peningkatan kualitas yang tentunya masyarakat yang merupakan salah satu kelompok yang terlibat juga dapat mengikuti pelatihan tersebut.

#### Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi (Lejlu, et al., 2014:519).

#### a) Tingkat Kebutuhan Masyarakat

Berdasarkan informasi yang didapat diketahui bahwa perbaikan infrastruktur khususnya yang berupa jalan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat di Kabupaten Karo. Hal demikian karena jalan membantu mobilitas masyarakat dalam bekerja maupun beraktivitas sehari-hari. Maka dari itu, perbaikan jalan merupakan kebutuhan yang harus diperhitungkan dalam melaksanakan Program KOTAKU. Permasalahan jalan juga termasuk ke dalam satu di antara tujuh indikator Program KOTAKU. Jalan masih menjadi

permasalahan krusial di Kabupaten Karo sehingga pemerintah setempat akan berfokus pada perbaikan jalan. Tingkat kebutuhan akan jalan semakin menguatkan bahwasanya jalan menjadi faktor penting pendorong kemajuan suatu daerah dan memudahkan akses masyarakat setempat.

Hal demikian dapat diketahui melalui perubahan di mana jalan yang tergenang air dan pihak Kabupaten Karo hanya memperbaiki jalan dengan menaburkan kerikil. Namun, dengan adanya Program KOTAKU yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat maka perbaikan jalan rusak dapat berlangsung optimal. Telah tercapai pemenuhan kebutuhan masyarakat Gundaling II yakni sebanyak 90%. Ini adalah angka yang tinggi mengingat beragamnya tingkat kebutuhan masyarakat berdasarkan tujuh indikator kota kumuh yakni kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Karo harus mengetahui terlebih dahulu tentang kebutuhan masyarakat sehingga dapat difokuskan penanganan atau fokus Program KOTAKU.

b) Kepuasan Masyarakat

Masyarakat mengakui bahwa telah menerima manfaat dari Program KOTAKU. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat dalam bidang kebersihan maupun aksesibilitas dan mobilitas. Maka dari itu, Program KOTAKU telah membawa manfaat yang signifikan kepada masyarakat Kabupaten Karo dan kehadiran program ini disambut baik oleh masyarakat. Kepuasan masyarakat ini ditanggapi juga oleh pihak Konsultan Program KOTAKU yang mengakui bahwa telah berkurangnya daerah kumuh. Akhirnya, dengan berkurangnya daerah kumuh maka semakin memberikan kepuasan kepada masyarakat. Masyarakat dapat merasakan bagaimana hidup atau bertempat tinggal di daerah yang nyaman, bersih, dan akses transportasi yang terjamin. Lalu, daerah yang masih kumuh dapat menjadi pekerjaan di masa akan datang untuk segera ditangani.

Berkaitan dengan kepuasan masyarakat, dapat diketahui juga bagaimana kondisi sebelum dan sesudah adanya Program KOTAKU. Kondisi sebelum dan sesudah ini penting untuk dikaji sehingga mampu

memperjelas apakah benar telah tercapai kepuasan masyarakat Kabupaten Karo. Kondisi sebelum dan sesudah membantu Pemerintah Karo untuk melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat dengan dibangunnya Program KOTAKU. Dapat diketahui bahwa di Kabupaten Karo terdapat permasalahan jalan rusak sehingga membuat masyarakat untuk bermobilisasi. Setelah adanya Program KOTAKU, jalan yang rusak tersebut dapat diperbaiki dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menggunakannya. Maka dari itu, Program KOTAKU membawa perubahan yang signifikan untuk membantu perubahan yang lebih baik.

**Pemerataan**

Program yang berorientasi pada pemerataan adalah program yang didistribusikan secara adil dan merata (Dunn, 2003:434). Untuk mengetahui pemerataan dapat diketahui melalui jenis manfaat yang diperoleh dan output yang dihasilkan.

a) Jenis Manfaat yang Diperoleh

Manfaat yang dirasakan berhubungan dengan menurunnya tingkat daerah kumuh di Kabupaten Karo baik dalam hal permukiman, sarana dan prasarana, hingga sanitasi. Selanjutnya, Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti dapat diketahui bahwa pihak yang paling banyak menerima manfaat adalah masyarakat.

Manfaat yang dirasakan masyarakat melalui Program KOTAKU adalah menurunnya tingkah daerah kumuh dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana yang lebih layak pakai. Hal demikian mengakibatkan masyarakat lebih mudah dalam beraktivitas, salah satunya melalui kemudahan dalam akses jalan atau transportasi dikarenakan adanya perbaikan jalan rusak, terpenuhinya kebutuhan air bersih dikarenakan air bersih yang mendukung, dan sebagainya. Program ini membantu masyarakat untuk dapat lebih nyaman bertempat tinggal. Tak hanya masyarakat, pihak pemerintah juga merasakan manfaat yang signifikan.

Manfaat yang dimaksud adalah lingkungan yang lebih asri dan bersih sehingga memberikan kenyamanan sebagai tempat tinggal yang layak huni. Di samping itu, terdapat manfaat lainnya di mana melalui Program KOTAKU, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat dikarenakan realisasi yang baik dalam Program KOTAKU. Hal demikian

menandakan bahwa keseriusan dan komitmen pemerintah membentuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mengingat bahwa pemerintah telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan dengan baik.

b) Output yang Dihasilkan

Berdasarkan informasi yang didapat diketahui bahwa keluaran yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah semakin berkurangnya daerah kumuh di Kabupaten Karo. Melalui lingkungan yang bersih dan terawat serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti drainase yang lancar hingga perbaikan jalan maka secara keseluruhan output yang dihasilkan dari Program KOTAKU adalah mampu mengurangi daerah kumuh. Selain itu, hal ini dapat memberikan peningkatan terhadap taraf dan kualitas hidup masyarakat dikarenakan terjadinya perbaikan sarana dan pra-sarana yang dilakukan dalam perjalanan program, seperti jalan ataupun drainase dan juga air bersih.

Dari Program KOTAKU membantu membentuk kehidupan yang lebih sehat untuk Masyarakat Kabupaten Karo. Permukiman yang layak huni dilengkapi dengan sarana maupun prasarana memadai membantu masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun, diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan dan merawat sarana dan prasarana yang telah dibangun dengan lancar. Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas serta observasi yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwasanya program KOTAKU memberikan manfaat yang lebih baik daripada sebelum ada program tersebut terutama adanya permukiman layak huni untuk masyarakat selain itu adanya output yang dihasilkan yaitu adanya pemerataan terhadap lingkungan yang kumuh sehingga menjadi lebih baik lagi.

**Ketepatan**

Kriteria ketepatan menanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk masyarakat sehingga ketepatan merujuk pada cara dan ketepatan dari tujuan kebijakan (Dunn, 2003:438). Untuk mengetahui ketepatan Program KOTAKU di Kabupaten Karo dapat dikaji melalui ketepatan sosialisasi dan ketepatan antara tujuan maupun manfaat Program KOTAKU.

a) Ketepatan Sosialisasi

Akbar (2021:76) menyatakan bahwa sosialisasi yang baik adalah sosialisasi yang mampu mencapai target dan membuat target memahami isi materi yang disosialisasikan. Berdasarkan informasi yang didapat diketahui bahwa sebelum diadakan Program KOTAKU, masyarakat akan diberikan sosialisasi bahwa nantinya untuk Program KOTAKU akan dibangun pavingbloc dan drainase yang menyentuh ke lingkungan masyarakat. Maka dari itu, terlebih dahulu harus diberikan gambar sederhana yang disampaikan dengan jelas kepada masyarakat tentang Program KOTAKU. Jika tidak diberikan sosialisasi maka masyarakat tidak tahu menahu ketika ada pembangunan pavingbloc dan drainase. Pihak Konsultan Program KOTAKU akan memberitahukan informasi dasar hingga krusial tentang program yang bersangkutan. Dengan demikian, untuk sosialisasi kepada masyarakat diberikan pengarahan oleh pihak yang paham tentang Program KOTAKU.

Sosialisasi juga dilakukan kepada dinas-dinas di Kabupaten Karo. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan pengarahan bahwasanya di Kabupaten Karo sedang dibangunlah Program KOTAKU untuk meminimalisir daerah-daerah kumuh. Dengan demikian, pihak dinas juga dapat ikut berpartisipasi untuk mendorong terwujudnya Program KOTAKU. Namun, berdasarkan pendapat salah seorang masyarakat dapat diketahui bahwa tidak ada dilakukan sosialisasi oleh pemerintah. Alhasil, masyarakat yang secara mandiri melalui BKM melakukan sosialisasi Program KOTAKU dan tentunya dengan bantuan Kepala Lingkungan (Kepling) sehingga dapat mengumpulkan masyarakat di satu lokasi.

Hanya saja, sosialisasi yang dilakukan belum maksimal. Hal demikian dikarenakan pola sosialisasi yang dilakukan tidak rutin. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat tidak hanya secara tatap muka namun juga melalui media cetak yang dipublikasikan secara menyeluruh.

b) Ketepatan Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan informasi yang didapat diketahui bahwa tujuan KOTAKU telah berjalan selaras dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Hal demikian dapat diketahui melalui terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan melalui

pembangunan jalan maupun aksesibilitas transportasi serta semakin meningkatnya tingkat kebersihan lingkungan. Sejumlah manfaat Program KOTAKU dapat mengarahkan masyarakat Kabupaten Karo untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan sehingga dapat terwujud lingkungan yang layak huni dan bersih. Manfaat selanjutnya adalah kemudahan mobilisasi masyarakat melalui perbaikan jalan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan, Lalu, drainase yang bersih, terawat, dan bebas sampah membantu menghindari terjadinya banjir. Hal demikian sesuai dengan tujuan Program KOTAKU untuk mewujudkan lingkungan yang layak huni.

Selain itu, partisipasi atau peran aktif masyarakat juga merupakan manfaat laten atau manfaat yang tidak disadari muncul dengan dibangunnya program KOTAKU. Dengan demikian, manfaat yang dirasakan masyarakat dengan tujuan yang telah ditetapkan mampu menumbuhkan semangat kerja sama dan partisipasi masyarakat yang dapat membantu agar Program KOTAKU tetap berlangsung bahkan semakin ditingkatkan baik dari segi anggaran, manusia, maupun pelayanan serta komitmen pelaksanaannya.

### **Responsivitas**

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu program dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Untuk mengetahui responsivitas Program KOTAKU dapat diketahui melalui sikap pemerintah dan sikap masyarakat dengan adanya KOTAKU.

#### **a) Sikap Pemerintah dengan Adanya Program KOTAKU**

Sikap yang dimaksud adalah tingkat keseriusan atau komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan Program KOTAKU. Dari informasi yang didapat melalui masyarakat bahwa pemerintah memberikan respon yang tanggap dalam menjawab pertanyaan masyarakat dan kebingungan yang dihadapi di lapangan. Adapun pemerintah yang dimaksud adalah konsultan Program KOTAKU. Pihak Konsultan sudah sepatutnya berperan mendampingi baik pemerintah kabupaten maupun masyarakat dalam melaksanakan Program KOTAKU. Namun, masyarakat lain juga berpendapat bahwa Dinas PERKIMTAN tidak begitu memberikan respon yang baik

kepada masyarakat. Masyarakat cenderung dekat dan percaya dengan keterlibatan pihak masing-masing kelurahan dan konsultan. Di samping keseriusannya, kelurahan dan konsultan mampu memberikan tanggapan yang baik, cepat, dan jelas dalam berbagai kegiatan Program KOTAKU. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih dekat dengan pihak kelurahan dan konsultan.

#### **b) Sikap Masyarakat dengan Adanya Program KOTAKU**

Berdasarkan informasi yang didapat diketahui bahwa masyarakat menyambut baik dan positif adanya Program KOTAKU. Hal demikian dikarenakan Program KOTAKU mampu memberikan manfaat dan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, sikap masyarakat adalah merasa puas dengan adanya Program KOTAKU. Tak hanya itu, masyarakat juga mendapatkan perubahan sikap atau perilaku hidup sehat. Masyarakat juga belajar banyak melalui Program KOTAKU. Masyarakat tidak hanya merasakan manfaat seperti jalan yang diperbaiki atau lingkungan yang bersih dari sampah. Lebih dari itu, keseriusan dan komitmen pemerintah membantu masyarakat untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan sekitar dan Program KOTAKU yang telah selesai. Sebagai contoh adalah ketika drainase sudah diperbaiki maka masyarakat harus menjaga kebersihan dan keterawatan drainase agar tidak rusak kembali. Contoh lainnya adalah berkaitan dengan lingkungan kumuh dan tidak layak huni maka masyarakat harus menjaga lingkungan tersebut sehingga tidak berubah kembali menjadi tempat yang tidak layak untuk menjadi tempat tinggal.

Maka dari itu, masyarakat dan pemerintah harus saling bahu-membahu dalam mendukung suatu program. Jika suatu program sudah diselesaikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka sudah menjadi inisiatif dan tugas masyarakat untuk menjaga keberlangsungan hasil dari Program KOTAKU tanpa terkecuali. Dengan demikian, baik sikap pemerintah maupun masyarakat sudah semakin memahami dengan baik betapa pentingnya kerja sama untuk menyelenggarakan suatu program.

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Karo

menggunakan model evaluasi William N. Dunn bahwa pada efektivitas Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Karo di Berastagi dan Kabanjahe sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Peran kelompok kerja seperti Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG), Konsultan Program KOTAKU, Dinas PERKIMTAN telah berhasil mencapai target. Pada efisiensi Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Karo di Berastagi dan Kabanjahe sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Peran kelompok kerja seperti Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG), Konsultan Program KOTAKU, Dinas PERKIMTAN telah berhasil mencapai target.

Pada Kecupuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Karo dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di mana pemerintah memberikan solusi atas segala permasalahan kekumuhan di Kabupaten Karo. Pada Pemerataan Pemerintah bersama konsultan melalui program KOTAKU berhasil menurunkan angka kekumuhan di Kabupaten Karo dengan perbaikan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang lebih baik lagi dan mengurangi lingkungan kumuh. Hanya saja, pelaksanaan KOTAKU hanya berfokus di Berastagi dan Kabanjahe. Pada Ketepatan Program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Karo telah disosialisasikan oleh konsultan melalui spanduk dan secara tatap muka di kantor desa ataupun rumah warga. KOTAKU juga telah mencapai ketepatan tujuan dan manfaat dalam meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni dan produktif.

Terakhir, pada responsivitas Pemerintah Kabupaten Karo menyikapi program KOTAKU yang berjalan dengan baik dikarenakan Pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan daerah kumuh dengan tangga berdasarkan perbandingan sebelum dan sesudah di Kabupaten Karo. Program KOTAKU disambut positif dikarenakan mampu merubah sikap masyarakat ke arah yang lebih baik lagi terutama permasalahan lingkungan di sekitar mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dapit, Soleh. (2021). Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 5.
- Dun, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pers Universitas Gadjah Mada.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kawasan Kumuh Perkotaan di Karo Capai 133 Hektar. <https://www.orbitdigitaldaily.com/kawasan-kumuh-perkotaan-di-karocapai-133-hektar/>. (Diakses 16 Agustus 2022).
- Lejlu, A., Masjaya & Irawan, B. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*. 2(4), 515-527.
- Lukman, M. (2015). Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 3(1), 1-11.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Permukiman Kumuh di Indonesia naik dua kali lipat. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190903/47/1144250/permukimankumuh-di-indonesia-naik-dua-kali-lipat>. (Diakses 18 Agustus 2022).
- Steers, Richard M. (1980). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Surat Keputusan Bupati Karo No.653/ 029/ 2021 tentang luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh.
- Undang Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28.

Wijaya, I. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Malang. *Jurnal Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan*. 11(1), 101-123.